

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal belum baik dilihat dari rasio yang menunjang untuk menilai kinerja keuangan serta mengetahui tingkat kemandirian, keefektifan dan tingkat pertumbuhan pada periode 2016 - 2019 melalui lima rasio yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Derajat Desentralisasi yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kemandirian Pemerintah Kabupaten Tegal dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih rendah, sehingga termasuk kedalam pola instruktif yakni peran pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah.
2. Efektivitas pemerintah Kabupaten Tegal dalam mengelola PAD belum baik dan dikategorikan tidak efektif.
3. Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menggunakan dananya belum berimbang, karena sebagian besar APBD digunakan untuk belanja operasional sedangkan rasio belanja modal terhadap APBD masih rendah.
4. Rasio Pertumbuhan Kabupaten Tegal mengalami fluktuasi dilihat dari hasil perhitungan rasio pertumbuhan PAD hal ini dikarenakan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima Kabupaten Tegal setiap tahunnya. Disisi lain pada belanja operasi mengalami kenaikan dan penurunan positif dibandingkan dengan pertumbuhan belanja modal.
5. Rasio Derajat Desentralisasi pemerintah Kabupaten Tegal mengalami fluktuatif dan dalam kategori rendah, hal ini ini berarti pemerintah daerah belum mampu untuk menyelenggarakan desentralisasi dengan mengoptimalkan potensi daerah (PAD) untuk menyelenggarakan pelayanan umum yang lebih baik.

5.2 Saran

1. Pemerintah Kabupaten Tegal diharapkan dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain dengan melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten Tegal juga harus tidak mengandalkan bantuan Pemerintah Pusat agar kedepannya tumbuh menjadi Kabupaten yang mandiri, mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.
2. Pemerintah Kabupaten Tegal sebaiknya lebih mengurangi proposional dalam mengalokasikan belanjanya, yakni mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal.
3. Pada perhitungan rasio pertumbuhan yang masih kurang baik diharapkan pemerintah lebih memperhatikan setiap aspeknya. Terutama pada aspek pertumbuhan belanja modal yang masih sangat rendah.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah jangka waktu penelitian.